



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### TELAAH LITERATUR

#### 2.1 Konstruksi Sosial

Manusia adalah makhluk yang berpikir. Aristoteles memperkenalkan “*Cogito, ergo sum*” yang artinya “saya berfikir karena itu saya ada”. Dengan berpikir manusia sadar akan kehidupan. Melalui pikirannya manusia secara aktif selalu menanggapi realitas sosialnya. Dalam banyak hal, manusia memiliki kebebasan untuk bertindak. Tindakan tersebut adalah wujud respon manusia terhadap stimulus yang merangsang pikirannya. Oleh karena itu, manusia secara aktif dan kreatif dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang bebas di dalam dunia sosialnya.

Bahasa menjadi alat konseptualisasi dan alat narasi untuk manusia dalam melihat dan menanggapi realitas sosial. Menurut Hamad (2001: 57), “bahasa bukan cuma mampu mencerminkan realitas, tetapi sekaligus menciptakan realitas.”

Dalam konstruksi realitas, bahasa merupakan unsur utama. Tanpa bahasa, maka tidak ada berita, cerita atau pun ilmu pengetahuan (Sobur, 2009: 91).

##### 2.1.1 Konstruksi Sosial Atas Realitas

Istilah konstruksi atas realitas sosial diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge* (1966).

Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksi, di mana individu menciptakan secara terus-menerus sesuatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Bungin, 2008: 13).

Alex Sobur (2009: 91) menjelaskan pemikiran Berger dan Luckmann mengenai realitas sosial dengan memisahkan pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas itu nyata.

Berger dan Luckmann (1990: 61) mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan.

Menurut Berger dan Luckmann, terjadi dialektika antara hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah (KBBI, 2001: 261)—antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Berger dan Luckmann menjelaskan tiga

tahap proses dialektis pemahaman terhadap suatu realitas, yaitu : (Eriyanto, 2002: 14-15):

1. Eksternalisasi

Adalah suatu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun kegiatan fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai yang terlepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia— dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. Tahap eksternalisasi berlangsung ketika produk sosial tercipta di dalam masyarakat, kemudian individu menyesuaikan diri ke dalam dunia sosio-kulturalnya sebagai bagian dari produk manusia (Bungin, 2008: 16).

2. Objektivitas

Adalah hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil dari eksternalisasi itu misalnya, manusia menciptakan alat demi mempermudah hidupnya, atau kebudayaan non-materiil dalam bentuk bahasa. Baik alat tadi maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia. Pada tahap ini sebuah produk sosial berada pada proses institusionalisasi. Objektivitas bisa terjadi melalui penyebaran opini. Bahasa memiliki peranan penting dalam

objektivitas. Bahasa merupakan alat simbolis untuk mensignifikasi di mana logika ditambahkan secara mendasar pada dunia sosial yang diobjektivasi. Bahasa digunakan untuk mensignifikasi makna-makna yang dipahami sebagai pengetahuan yang relevan dengan masyarakat (Berger dan Luckmann, 1990: 100). Jadi, dengan demikian yang terpenting dalam tahap objektivikasi ini adalah melakukan signifikasi, memberikan tanda bahasa dan simbolisasi terhadap benda yang disignifikasi (Bungin, 2008: 18).

### 3. Internalisasi

Adalah penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat.

Internalisasi secara umum (Bungin, 2008: 19) merupakan dasar; *pertama*, bagi pemahaman mengenai “sesama saya”, yaitu pemahaman individu dan orang lain; *kedua*, bagi pemahaman mengenai dunia sebagai suatu yang maknawi dari kenyataan sosial.

Pemahaman ini dimulai dengan individu “mengambil alih” dunia di mana sudah ada orang lain. Dalam proses “mengambil alih” itu, individu dapat memodifikasi dunia, bahkan secara kreatif dapat menciptakan ulang dunia.

Franz M. Parera seperti yang dikutip oleh Burhan Bungin (2008: 15) menambahkan bahwa tiga momen (eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi) itu memunculkan suatu proses konstruksi sosial yang merupakan hasil ciptaan manusia.

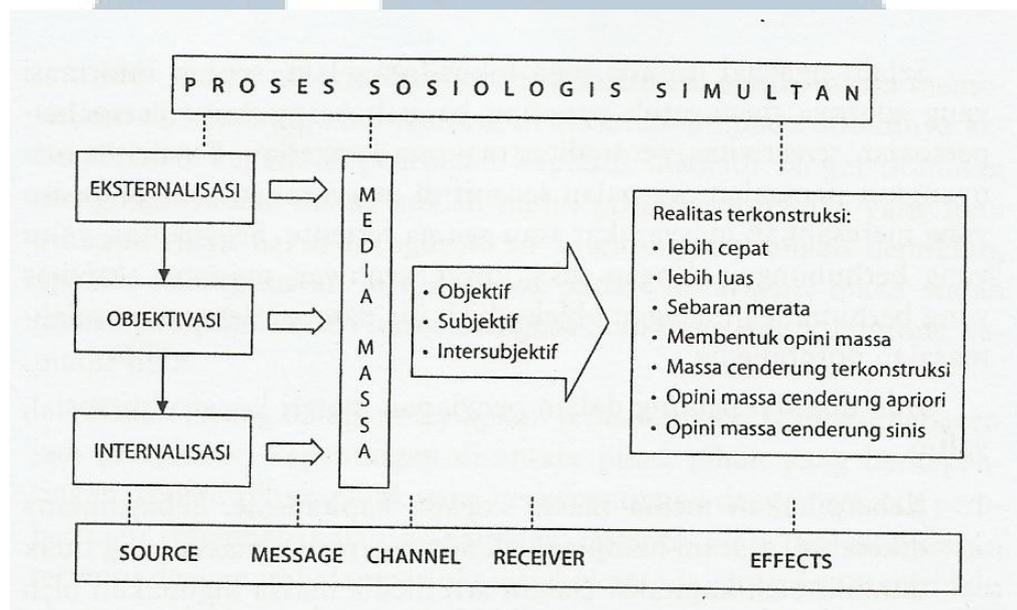
Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang memiliki pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing. Sebut saja mengenai isu dugaan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

### **2.1.2 Konstruksi Realitas Sosial Media Massa**

Berdasarkan perkembangan zaman yang semakin modern, pemikiran konstruksi realitas sosial telah diperbaharui dan melihat variabel atau fenomena media massa menjadi sangat substansial.

Menurut Burhan Bungin (2008: 194), “substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa.”

Posisi “konstruksi sosial media massa” adalah sebagai koreksi substansi kelemahan dan melengkapi “konstruksi sosial atas realitas”, dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efeknya.



**Gambar 2.1**  
**Proses Konstruksi Sosial Media Massa (sumber: Burhan Bungin, 2008: 195)**

Proses simultan yang digambarkan di atas tidak berkerja secara tiba-tiba. Proses ini muncul setelah melalui beberapa tahap. Dari konten sosial media massa, dan proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui tahap berikut (Bungin, 2008: 195-201):

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi.

Redaksi dalam media massa bertugas untuk menyiapkan materi konstruksi sosial media massa. Tugas tersebut didistribusikan pada *desk* editor yang ada di setiap media massa. Masing-masing media memiliki *desk* berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan visi media. Isu-isu penting menjadi fokus media massa, terutama yang

berhubungan dengan hal-hal berikut, yaitu kedudukan (jabatan, pejabat, dan kinerja birokrasi dan layanan publik), harta (kekayaan, kemewahan materi, termasuk juga persoalan korupsi), perempuan (aurat, wanita cantik dan segala macam aktivitas mereka), menyentuh perasaan banyak orang, sensitivitas (isu yang meresahkan masyarakat atau agama tertentu), dan sensualitas (seks, pronografi). Terdapat tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial, yaitu:

- 1) Keberpihakan media massa pada kapitalisme. Hampir tidak ada media massa yang tidak dimiliki oleh kapitalis. Media massa digunakan sebagai mesin penciptaan uang dan pelipatgandaan modal.
- 2) Keberpihakan semu kepada masyarakat. Bentuk keberpihakan ini adalah dalam bentuk empati, simpati dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun ujung-ujungnya juga untuk “menjual berita” demi menaikkan oplah atau *rating*.
- 3) Keberpihakan kepada kepentingan umum. Bentuk keberpihakan kepada kepentingan umum terlihat dari visi setiap media massa. Visi dan slogan dari masing-masing media tetap terdengar akan tetapi tak pernah menunjukkan jati diri sebenarnya.

Keberpihakan kepada kapitalis lebih dominan. Tujuannya untuk mencari keuntungan. Sehingga tidak jarang dalam menyiapkan sebuah materi pemberitaan, banyak kepentingan yang mempengaruhi pemberitaan tersebut.

## 2. Tahap sebaran konstruksi.

Tahap sebaran konstruksi konkretnya adalah pada strategi media. Akan tetapi prinsipnya sama, yaitu *real time*. Setiap jenis media memahami prinsip *real time*-nya masing-masing. Media elektronik tentunya bersifat *live*, langsung seketika itu juga. Sedangkan media cetak, termasuk surat kabar, melihat konsep *real time* hubungannya pada terbitan harian, mingguan atau bulanan. Walaupun media cetak memiliki konsep *real time* yang tertunda, namun aktualisasi menjadi pertimbangan utama sehingga pembaca merasa tepat waktu memperoleh berita tersebut.

Tahap sebaran konstruksi mengacu pula pada wilayah sebaran berdasarkan segmentasi. Bagi yang suka olahraga tentunya berbeda segmen dengan mereka yang lebih memilih peralatan kecantikan. Pilihan sumber informasi juga disesuaikan dengan pemetaan kekuasaan oleh sumber informasi itu dimasyarakatnya. Pilihan SBY sebagai sumber informasi tentunya berdasarkan pemetaan kekuasaan sosial SBY di lingkungannya, misalnya Partai Demokrat atau Negara Indonesia.

## 3. Tahap pembentukan konstruksi realitas.

1) Tahap pembentukan konstruksi realitas adalah tahap selanjutnya setelah sebaran konstruksi. Pemberitaan dianggap telah sampai pada pembaca/pemirsa sehingga terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung secara generik. *Pertama*, konstruksi realitas membenaran; *kedua*, kesediaan dikonstruksi oleh media massa; *ketiga*, sebagai pilihan konsumtif.

*Tahap pertama*, adalah konstruksi membenaran sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbangun di masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja yang tersaji di media sebagai sebuah realitas kebenaran.

*Tahap kedua*, adalah kesediaan dikonstruksi oleh media massa, yaitu sikap generik dari tahap pertama. Bahwa pilihan seseorang untuk menjadi pembaca media massa adalah karena pilihannya yang memberikan kesempatan pada media massa untuk mengkonstruksi pikirannya.

*Tahap ketiga*, adalah menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif, di mana seseorang secara *habit* tergantung pada media massa. Media massa adalah bagian hidup yang tak terlepas.

2) Pembentukan konstruksi citra adalah bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi. Bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua

model. *Pertama*, model *good news*; *kedua*, model *bad news*.

Model *good news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Pada model ini objek pemberitaan dikonstruksi sebagai sesuatu yang memiliki citra baik sehingga terkesan lebih baik dari sesungguhnya. Model *bad news* adalah kebalikkan dari *good news*. Dalam model ini objek pemberitaan cenderung diberitakan citra buruk sehingga terkesan lebih buruk, lebih jelek dari sesungguhnya.

#### 4. Tahap konfirmasi.

Tahapan ini terjadi ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini penting sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasan konstruksi sosial. Sedangkan bagi pembaca/pemirsa, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan keterlibatan mereka dalam proses konstruksi sosial.

Sejumlah alasan yang digunakan dalam konfirmasi, umpamanya: pribadi yang jauh dari media akan menjadi pribadi yang kehilangan informasi, oleh karena itu ia akan selalu terlambat meraih kesempatan dan berubah; kedekatan dengan media ada kaitannya dengan *lifestyle* orang modern; media massa hadir sebagai sumber pengetahuan yang selalu bisa diakses.

Sebuah teks berita tidak bisa kita samakan seperti sebuah kopi dari realitas, ia haruslah dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya, sangat potensial terjadi peristiwa yang sama namun dikonstruksi secara berbeda (Eriyanto, 2002: 17).

Wartawan dari masing-masing institusi media pasti memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Salah satu wartawan mungkin menganggap bahwa isu tersebut adalah isu yang luar biasa, karena dilihat dari sumbernya yang terpercaya. Wartawan lain mungkin saja menganggap isu tersebut hanyalah isu biasa, yang tidak memiliki nilai berita. Semua itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu, yang diwujudkan dalam teks berita.

Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti riil. Di sini realitas adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta (Eriyanto, 2002: 17).

## 2.2 Framing

Kenapa isu dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden SBY mendapat porsi berita yang besar di *Media Indonesia* di halaman satu?

Padahal dihari yang sama telah terjadi gempa tsunami yang dasyat di Jepang, tetapi berita tentang bencana tersebut tidak muncul di halaman satu koran tersebut. *Kompas* pun demikian, kenapa berita bencana menjadi prioritas?

Padahal presiden RI sedang diguncang isu penyalahgunaan kekuasaan.

Kenapa peristiwa ini diberitakan sementara peristiwa itu tidak? Kenapa sisi ini diberitakan sementara sisi yang itu luput diberitakan? Kenapa aspek yang ini ditonjolkan sedangkan aspek yang itu disamarkan atau malah dihilangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini semua mengarah pada konsep yang disebut sebagai framing.

Eriyanto, dalam bukunya *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (2002: 2), menjelaskan bahwa, “media bukan hanya sekedar saluran. Media juga tidak secara murni memberitakan peristiwa apa adanya. Oleh karena itu media bukan cermin atas realitas. Media justru mengkonstruksi realitas.” Banyak kejadian-kejadian yang bisa dijadikan berita. Namun, ada kejadian yang diberitakan ada yang tidak. Ada yang menganggap penting ada yang tidak menganggap sebagai berita. Ada peristiwa yang dimaknai berbeda, dan wawancara dengan orang yang berbeda, dengan perhatian yang berbeda. Semua kenyataan ini menyadarkan bahwa media sangatlah subjektif.

Alex Sobur (2001: 161-162) menjelaskan, gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955, “mulanya, *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana, serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas.”

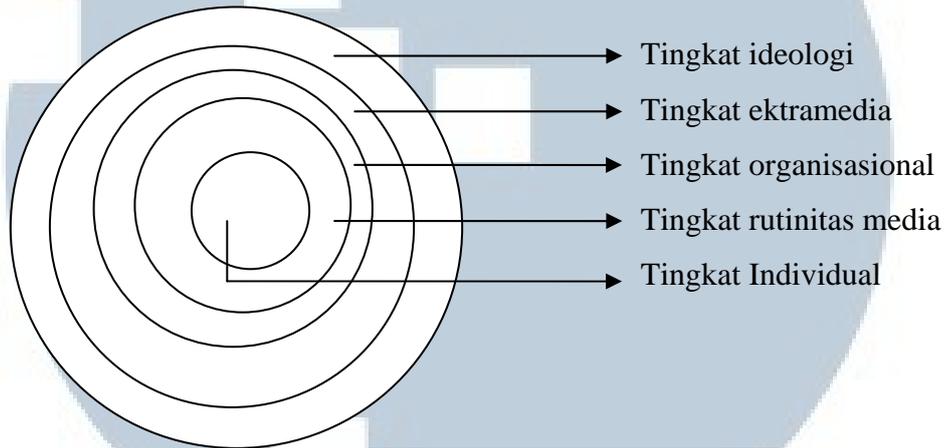
Tentang proses konstruksi realitas, prinsip setiap upaya “menceritakan” sebuah peristiwa, keadaan atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal berkaitan dengan politik adalah usaha mengkonstruksi realitas. Karena sifat

dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksi berbagai realitas yang akan disiarkan (Hamad, 2004: 11). Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi wacana yang bermakna.

Dalam mengkonstruksi realitas, bahasa adalah unsur yang utama. Bahasa merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi (Hamad, 2004: 12). Tanpa bahasa maka tidak ada cerita, berita maupun pengetahuan. Sehingga menjadi jelas bahwa seluruh media menggunakan bahasa sebagai instrumen pokok penyampaian berita.

Selanjutnya sebagaimana ditunjukkan oleh Shoemaker dan Reese (1991), terdapat banyak variabel yang mempengaruhi isi media. Faktor-faktor itu terbagi atas dua bagian besar, yaitu faktor di dalam media dan di luar media. Faktor di dalam media berkaitan dengan karakteristik individu pekerja media (komunikator) dan rutinitas yang berlangsung dalam organisasi media (*media routine*). Sedangkan faktor di luar media adalah variabel ekstramedia yang antara lain adalah sumber-sumber informasi media, pengiklan, khalayak sasaran, kontrol pemerintah atau pasar media. Sementara itu, variabel di tingkat ideologi (*worldview*) mempersoalkan berbagai sistem kepercayaan, nilai dan makna yang digunakan oleh media massa untuk menentukan isi yang ditampilkan. Shoemaker dan Reese menyebut pengaruh-pengaruh tersebut sebagai "*hierarchy of influence*" yang merupakan lapisan-lapisan yang melingkupi institusi media tersebut, dimulai dari faktor ideologi yang

merupakan sistem yang bersifat makro sampai pada yang lebih mikro, yaitu karakteristik individu pekerja media. Tiap tingkatan memiliki jangkauan tersendiri, namun tetap tunduk dan dibatasi oleh tingkatan hierarki yang lebih tinggi (Shoemaker, et al, 1996: 33-37).



**Gambar 2.2**  
**Hierarki Pengaruh Shoemaker**

Tingkat individual yang dimaksud di sini adalah wartawan sebagai pekerja media. Faktor pekerja media turut memiliki peran dalam mempengaruhi produksi isi media. Sejumlah faktor karakteristik dari pekerja, latar belakang personal dan profesional atau pengalaman individual, juga nilai-nilai serta kepercayaan maupun etika yang mereka anut juga turut mempengaruhi isi media.

Tingkat rutinitas media juga akan mempengaruhi isi media. Shoemaker dan Reese (Shoemaker, et al, 1996: 87) mengatakan bahwa, rutinitas mempunyai dampak yang besar terhadap isi media, karena rutinitas adalah lingkungan sesungguhnya dari pekerja media dan tidak dapat dipisahkan dengan pekerja media dalam melakukan pekerjaan mereka. Rutinitas diibaratkan dua sisi mata uang bagi media, satu sisi rutinitas meringankan pekerjaan media karena akan menjamin kelancaran roda organisasi media dan

efisiensi, tetapi di sisi lain dia merupakan penghambat atau penghalang bagi individu pekerja media dalam melaksanakan tugas karena adanya keterbatasan dalam pilihan dan keleluasaan penulisan dan pemuatan berita. Rutinitas dalam media biasanya berkaitan dengan kegiatan seleksi yang dilakukan wartawan yang menjalankan fungsinya sebagai *gatekeeper* (penjaga gawang). Tugas *gatekeeper* adalah memilih sedemikian banyak berita yang masuk dimuat pada halaman tertentu. Hal lain yang juga mempengaruhi adalah adanya *deadline* dan rintangan waktu yang lain, keterbatasan space untuk menyajikan berita. Untuk memahami rutinitas pekerja media, Shoemaker dan Reese memakai kerangka teori dari Mannheim tentang kedudukan individu dalam kelompok. Individu diartikan sebagai manusia yang tidak bebas. Mereka terikat oleh lingkungan dan kelompoknya.

Media massa adalah sarana untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Informasi berupa berita tersebut merupakan hasil kerja para pekerja media. pada level organisasi media seperti peranan yang diemban pekerja media, struktur dan bentuk dari organisasi serta tujuan utama dari organisasi media yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap produksi media. selain itu, kekuasaan organisasi media terletak pada pemiliknya. Sebagai pihak yang menentukan dan mendorong pelaksanaan kebijakannya, pemilik modal memiliki pengaruh yang besar terhadap produksi berita.

Tingkat ekstra media berkaitan dengan faktor lingkungan di luar media yang sedikit banyak akan mempengaruhi pemberitaan media. Shoemaker dan

Reese menjelaskan bahwa faktor ekstramedia yang mempengaruhi isi media berkaitan dengan beberapa hal, yaitu: sumber-sumber berita, kelompok kepentingan tertentu, pemasangan iklan dan khalayak, pengawasan dari pemerintah berupa peraturan-peraturan pers, pasar dan lingkungan media serta teknologi.

Shoemaker dan Reese mengemukakan bahwa media memiliki cara sendiri ketika menyajikan suatu realitas. Peristiwa yang sama akan dimaknai dan disajikan secara berbeda, sehingga menghasilkan penafsiran yang berbeda pula. Hal ini berkaitan erat dengan ideologi yang dimiliki oleh sebuah media sehingga Shoemaker dan Reese mengkategorikan hal ini dalam tingkat ideologi media dalam hirarki pengaruh.

Apa yang telah disebutkan oleh Shoemaker ini menjadi semakin jelas bahwa media, melalui level pertama yaitu individu (wartawan), memiliki peran pertama kali dalam melakukan pembingkai dan mengkonstruksi realitas sesuai dengan kacamata mereka. Lalu kemudian menggunakan bahasa sebagai alat bertutur, bercerita dan membuat berita yang kemudian hendak disiarkan oleh media nantinya.

Wartawan mempunyai kesempatan untuk mengontrol kesadaran khalayak lewat penafsiran mereka yang disodorkan kepada khalayak.

Wartawan secara subjektif memberi pemaknaan atas peristiwa atau fakta tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak (Bimo Nugroho, et al, 1999: 51).

### 2.2.1 Konsep Framing

Terdapat beberapa definisi konsep framing yang disampaikan oleh para ahli. Menurut mereka, pengertian framing adalah sebagai berikut (Eriyanto, 2002: 67-68):

**Tabel 2.1**  
**Konsep framing menurut para ahli**

Robert N. Entman	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi lain.
William A. Gamson	Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (package). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.
Todd Gitlin	Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Hal itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki	Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Sumber: Eriyanto, 2002, hlm: 67-68

Berikut adalah model framing dari masing-masing tokoh yang sudah disebutkan di tabel atas:

Konsepsi framing dari Entman menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Dimulai dari seleksi isu hingga penonjolan aspek tertentu oleh media. *Define problems* adalah elemen pertama yang digunakan pertama kali untuk melihat *master frame*. Bagaimana wartawan melihat isu atau peristiwa. Elemen kedua adalah *diagnose causes*. Elemen ini digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Elemen ketiga adalah *make moral judgement*. Elemen ini dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Elemen yang terakhir adalah *treatment recommendation*. Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih wartawan untuk menyelesaikan masalah (Eriyanto, 2002: 189-192).

Menurut William A. Gamson, sebuah frame mempunyai struktur internal. Pada titik ini ada sebuah pusat organisasi atau ide, yang membuat peristiwa menjadi relevan dan menekankan suatu isu. Gamson melihat wacana berita yang dimunculkan media terdiri atas sejumlah kemasan (package) konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk. Kemasan tersebut, dibayangkan sebagai wadah atau struktur data yang mengorganisir sejumlah informasi yang menunjukkan posisi atau kecenderungan politik, dan yang membantu komunikator untuk menjelaskan muatan-muatan di balik isu atau peristiwa. Keberadaan dari suatu kemasan terlihat dari adanya gagasan sentral yang

kemudian didukung oleh perangkat wacana—seperti kata, kalimat, pemakaian gambar atau grafik tertentu, proposisi dan sebagainya. Semua elemen dan struktur wacana tersebut mengarahkan pada ide tertentu dan mendukung ide sentral dari suatu berita (Eriyanto, 2002: 223-225).

Ada dua perangkat bagaimana ide sentral ini diterjemahkan dalam teks berita. Pertama, *framing device* (perangkat framing). Perangkat ini berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat framing ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar dan metafora tertentu. Kesemua elemen tersebut dapat ditemukan dan ditandai serta merujuk pada gagasan atau ide sentral tertentu. Kedua, *reasoning device* (perangkat penalaran). Kalau yang pertama berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat atau metafora tertentu yang menunjuk pada gagasan tertentu maka perangkat penalaran berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks tersebut yang merujuk pada gagasan tertentu. Sebuah gagasan tidak hanya berisi kata atau kalimat, sebuah gagasan juga ditandai dengan dasar pembenar tertentu, alasan tertentu. Dasar pembenar atau penalaran tersebut lebih jauh membuat pendapat atau gagasan tampak benar, absah dan demikian adanya (Eriyanto, 2002: 227).

Framing menurut Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki, mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen

semantik narasi berita. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks (Sobur, 2009: 175).

Struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa. Dapat diamati dari bagan berita—*headline* yang dipilih, *lead* yang dipakai, latar informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip. Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa. Kemudian struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur retorik berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, struktur retorik melihat pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar, yang dipakai guna memberi penekanan pada arti tertentu (Sobur, 2009: 176).

Dapat disimpulkan bahwa setiap konsep framing yang diutarakan oleh masing-masing ahli adalah berbeda. Robert N. Entman mengkonsepkan framing untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. William A. Gamson mengkonsepkan framing sebagai gugusan ide-ide atau cara bercerita yang tersusun sedemikian rupa yang membentuk makna dari peristiwa yang berkaitan dengan wacana. Menurut

Gamson, wacana media terdiri atas sejumlah kemasan (*package*) melalui mana sebuah realita dibentuk.

Berbeda halnya dengan Pan dan Kosicki. Pan dan Kosicki menyatakan bahwa ada strategi dalam mengkonstruksi realitas sehingga khalayak lebih tertuju pada realitas bentukan media. Menurut mereka, hal ini tidak bisa lepas dari pada dua konsepsi penting, konsepsi psikologis (bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya) dan konsepsi sosiologis (bagaimana seseorang secara kognitif menafsirkan peristiwa menurut cara pandangnya). Sehingga konsep framing di sini dipahami sebagai proses seseorang mengklarifikasi, mengorganisasi dan menafsirkan pengalamannya untuk mengerti dirinya dan realitas di luarnya.

### **2.2.2 Analisis framing**

Dalam analisis framing, yang dilakukan pertama kali adalah melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Sehingga jelas bahwa analisis framing adalah metode analisis teks yang merupakan bagian dari paradigma konstruktivis (Eriyanto, 2002: 37).

Lebih lanjut, Eriyanto (2002: 3-4) menggambarkan analisis framing secara sederhana adalah sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Seperti halnya ketika kita melihat lewat jendela, seringkali ada batasan pandangan yang menghalangi penglihatan kita saat melihat sesuatu di luar sana. Dalam berita, jendela itulah yang disebut dengan *frame* (bingkai).

Apa yang dilakukan oleh media, dengan memberitakan sebuah berita, menekankan isu tersebut dan menghilangkan aspek lain maka media sudah melakukan pembingkai. Pembingkai tersebut tentunya melalui proses konstruksi.

Dalam penelitian framing, yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana realitas/peristiwa dikonstruksi oleh media. Lebih spesifik, bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu. Dengan demikian, yang menjadi perhatian bukan apakah media memberitakan negatif atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media.

Paradigma konstruktivis memiliki penilaian sendiri tentang bagaimana media, wartawan dan berita dilihat. Eriyanto (2002: 19-36) menjelaskannya sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Media dan berita dilihat dari paradigma konstruktivis**

Fakta	Fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran dari sebuah fakta bersifat relatif.
Media	Media adalah agen konstruksi. Media bukan hanya sekedar saluran bebas, tetapi sekaligus sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan keberpihakan.
Berita	Berita bukan refleksi dari realitas, karena berita merupakan bentuk media dalam melihat peristiwa. Berita juga bersifat subjektif, sebab opini tidak dapat dihilangkan ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif.
Wartawan	Wartawan bukan hanya pelapor, tetapi juga sebagai agen konstruksi realitas. Wartawan adalah partisipan yang menjembatani keragaman subjektifitas pelaku sosial.
Etika, moral dan	Aspek etika, moral dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media. Aspek-aspek tersebut

keberpihakan wartawan	adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas.
Etika, nilai dan pilihan moral peneliti	Nilai, etika dan pilihan moral adalah bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Peneliti adalah entitas dengan berbagai nilai dan keberpihakan yang berbeda-beda. Objek penelitian yang sama akan menghasilkan penelitian yang berbeda di tangan peneliti yang berbeda pula.
Khalayak	Khalayak memiliki penafsiran sendiri yang bisa jadi berbeda dengan pembuat berita. Khalayak dipandang sebagai pihak yang aktif.

Sumber: Eriyanto,2002, hlm: 19-35

Perspektif komunikasi menggunakan analisis framing untuk membedah cara-cara media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2009: 162).

Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek tertentu (Sudibyo, 2001: 186).

Eriyanto (2002: 68) menegaskan inti dari konsep framing sebagai berikut, “framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut.”

Oleh karena itu wartawan memiliki peran aktif dalam mengkonstruksi realitas. Sebab wartawan adalah aktor yang berinteraksi langsung dengan peristiwa yang sedang ia hadapi. Lebih lanjut, Sudibyo (2009: 227) menuturkan bahwa seorang wartawan, tidak hanya dibekali dengan pemahaman tentang *news value*, tetapi juga semacam *story line* yang mengkondisikannya melakukan seleksi dan reduksi atas begitu banyak peristiwa dan informasi yang secara cepat dan rutin harus mereka sajikan kepada publik.

Dalam setiap wacana yang ditulis wartawan, seperti yang sudah dijelaskan tentunya memiliki pemilihan isu dan penonjolan berita yang berbeda. Setiap surat kabar memiliki caranya masing-masing yang kemudian mempengaruhi penulisan sebuah berita. Seperti halnya pemberitaan isu dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden SBY yang ditulis oleh surat kabar harian *Media Indonesia* dan harian *Kompas*. Keduanya memiliki pandangan yang tentu berbeda tentang isu tersebut meski topik atau peristiwanya sama. Dalam menyajikan berita, keduanya memberikan sorotan yang berbeda atas dasar aspek yang berbeda pula. Hal tersebut dapat dilihat dari letak berita, pembahasan masalah hingga penggunaan bahasa.

### **2.2.3 Aspek Framing**

Menurut Eriyanto (2002: 69-70), ada dua aspek dalam framing. Yang pertama yaitu proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta selalu terkandung dua kemungkinan yaitu apa yang dipilih (*included*) dan apa yang di

buang (*excluded*). Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih *angle* tertentu, memilih fakta tertentu dan melupakan fakta lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lainnya.

Yang kedua, proses menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan perangkat tertentu: penempatan apa yang mencolok (menempatkan di *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplikasi dan pemakaian kata yang mencolok, gambar dan sebagainya. Elemen menulis ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Akibatnya aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi lebih terlihat, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita untuk menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol dan mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.

#### 2.2.4 Efek Framing

Framing berkaitan dengan bagaimana realitas dibingkai dan disajikan kepada khalayak. Dari kalimat di atas, efek framing sudah secara tersirat digambarkan. Framing memunculkan efek sederhana di mana realitas sosial yang kompleks, penuh dimensi dan tidak beraturan disajikan dalam berita sebagai sesuatu yang sederhana, beraturan dan memenuhi logika tertentu yang kemudian dikonsumsi oleh khalayak. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggali informasi. Sebab informasi tersebut telah dikonstruksi dan dikontekstualkan untuk memudahkan pembaca.

Framing yang dilakukan media adalah semata-mata untuk menonjolkan sebuah isu. Hasil akhirnya adalah agar isu yang ditonjolkan oleh media membentuk opini masyarakat. Aspek yang ditonjolkan menjadi mudah dikenal oleh masyarakat pembaca sedangkan aspek yang tidak diberitakan menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak.

Ketika media menonjolkan aspek tertentu, maka secara tidak langsung akan mengaburkan aspek lain. Berita secara sadar atau tidak diarahkan pada aspek tertentu. Akibatnya ada aspek lainnya yang tidak mendapatkan perhatian. Lalu, media memiliki kecenderungan dalam menampilkan sisi tertentu dan melupakan sisi lainnya. Misalnya saja demonstrasi mahasiswa yang diberitakan berujung pada kerusuhan. Karena media lebih menampilkan sisi kerusuhannya, aspek lain seperti tuntutan mahasiswa menjadi terlupakan. Hal ini kemudian memunculkan kesan bahwa aksi mahasiswa hanyalah memunculkan kerusuhan. Berita seringkali juga memfokuskan pemberitaan

pada aktor tertentu. Hal tersebut tidak salah, tetapi efek yang muncul adalah memfokuskan pada satu pihak atau aktor tertentu menyebabkan aktor lain yang mungkin saja relevan dan sama pentingnya menjadi terlupakan (Eriyanto, 2002: 141-142).

Seperti yang terjadi di *Media Indonesia* misalnya, terkait isu dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh SBY, sosok Any Yudhoyono disebut sebagai aktor yang punya peran penting dalam sepak terjang SBY.

Media yang menampilkan, menonjolkan dan menekankan unsur tertentu dalam sebuah berita tentu saja akan mengarahkan opini publik. Seperti yang dikatakan Eriyanto (2002: 142), bahwa framing berkaitan dengan opini publik. Karena isu tertentu ketika dikemas dengan bingkai yang berbeda bisa mengakibatkan pemahaman khalayak yang berbeda atas isu. Media massa menerapkan strategi agar khalayak memiliki pandangan yang sama atas isu yang dimunculkan oleh media. Dengan strategi tersebut maka khalayak dapat digerakkan dan dimobilisasi sehingga khalayak memiliki kesamaan pendapat dengan media.

Peristiwa-peristiwa tertentu yang dramatis dan diabadikan, ternyata mempunyai pengaruh pada bagaimana seseorang melihat suatu peristiwa. Sebuah peristiwa yang dramatis akan digambarkan secara dramatis pula oleh media. Pemunculan ikon tertentu secara berulang-ulang disebutkan, akan membentuk persepsi khusus pada ikon tersebut. W. Lance Bannet dan Regina G. Lawrence menyebutnya sebagai *news icon* (Eriyanto, 2002:150). Ikon yang dikonstruksi sedemikian rupa oleh media akan memunculkan persepsi

khalayak tentang ikon tersebut sehingga menggiring khalayak pada ingatan tertentu.

Pemunculan berita dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh media, menjadikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ikon. Ikon yang dikonstruksi oleh media sedemikian rupa akan semakin mudah diingat oleh khalayak.

Oleh karena itu, menurut Aditjondro (Siahaan et al., 2001: 9-10), “proses framing merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses penyuntingan yang melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian media.”

### **2.3 Konsep Surat Kabar**

Definisi surat kabar menurut Ensiklopedi (1991: 431) adalah “media komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, *feature*, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Tujuan dasar surat kabar adalah memperoleh berita dari sumber yang tepat untuk disampaikan secepat dan selengkap mungkin kepada para pembaca.”

Menurut Djafar H. Assegaf (1985: 140), definisi surat kabar adalah “penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita-berita, karangan dan iklan yang dicetak dan terbit secara tetap atau periodik dan dijual untuk umum.”

Sementara Kurniawan Junaedhi (1991: 257), mendefinisikan surat kabar sebagai, “sebutan bagi penerbitan pers yang masuk dalam media massa

tercetak, berupa lembaran-lembaran berisi berita-berita, karangan iklan dan terbitan secara berkala bisa harian, mingguan, bulanan serta diedarkan secara umum. Isinya pun harus bersangkutan paut dengan manusia dari berbagai golongan dan kalangan.”

Dalam kaitan dengan penelitian, berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, surat kabar harian *Media Indonesia* dan *Kompas* termasuk dalam kategori surat kabar karena memuat isu dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden SBY yang dituangkan kedalam teks berita.

Fungsi surat kabar secara umum menurut Sobur dalam makalah *Dasar Jurnalistik*:

1. *Publishing the news* (menerbitkan atau menyiarkan berita).

Berita harus dilaporkan lengkap agar pembaca puas. Pembaca mengharapkan dapat membaca suatu berita lengkap di surat kabar. Surat kabar harus menyiapkan segala ssesuatu dengan benar, namun demikian ada beberapa surat kabar yang menyiarkan berita sesuai dengan kebijaksanaan dari pada redaksi. Surat kabar bertindak sebagai penerjemah dari suatu peristiwa. Surat kabar menceritakan secara benar mengenai peristiwa.

2. *Commentating on the news* (memberi komentar terhadap suatu berita)

Fungsi ini memungkinkan pembaca menemukan maksud dari suatu berita dan apa yang dikatakan orang lain tentang berita itu. Cara

untuk memenuhi fungsi ini melalui editorial atau tajuk rencana.

Editorial adalah opini redaksi terhadap suatu masalah untuk memperjelas suatu berita pada pembaca dengan cara memberikan interpretasi dan memberikan latar belakang.

3. *Entertaining readers* (menghibur pembaca)

Artikel dalam surat kabar dapat memberikan hiburan kepada pembaca.

4. *Helping readers* (menolong pembaca bagaimana cara menggunakan sesuatu).

George Fox Mott dalam buku *New Survey of Journalism* menyatakan bahwa suatu surat kabar banyak membantu dalam hal. Misalnya, berita yang ditulis memberikan informasi mengenai kejadian terkini; surat kabar juga dapat menyajikan beragam informasi mengenai resensi film dan buku.

5. *Publishing advertising* (menerbitkan atau menyiarkan barang dan jasa).

Onong Uchjana Effendy dalam karya *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* memberikan ciri-ciri mengenai surat kabar:

1. Publisitas.

Surat kabar diperuntukkan bagi umum, karena itu isinya baik berita, tajuk rencana, artikel dan lainnya berkaitan erat dengan kepentingan umum. Sehingga apabila ada penerbitan yang bentuknya serupa

namun hanya untuk kepentingan kelompok tertentu tidak termasuk ke dalam surat kabar.

2. Periodesitas.

Waktu penerbitannya bersifat periodik (berkala), bisa harian, mingguan atau bulanan. Penerbitan seperti buku, misalnya tidak disebarakan secara periodik, tidak teratur, karena terbitnya hanya satu kali. Meskipun diterbitkan dan isinya untuk umum namun tidak mempunyai ciri periodesitas maka tidak bisa disebut surat kabar.

3. Universalitas.

Ciri surat kabar yang satu ini menunjukkan surat kabar harus menyajikan berbagai informasi yang beragam mengenai kejadian di seluruh dunia yang menyangkut aspek kehidupan.

4. Aktualitas.

Isi surat kabar harus bersifat aktual (baru), artinya berita yang disajikan adalah laporan mengenai peristiwa yang baru terjadi. Aktualitas merupakan ciri terpenting, sebab pada umumnya pembaca menginginkan berita-berita yang baru terjadi.

## 2.4 Konsep Berita

Paul De Massenner dalam buku *Here's The News: Unesco Associate*, mendefinisikan berita sebagai sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak.

Berita menurut Mitchel V. Charnley seperti dikutip oleh Asep Syamsul, M. Romli (2001: 1), dalam bukunya *Jurnalistik Praktis*, adalah “laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian besar pembaca serta menyangkut kepentingan mereka”.

Definisi lain menurut William S. Maulsby dalam *Getting the News*, “berita bisa diidentifikasi sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca.”

Haris Sumadiria (2005: 65) mendefinisikan berita sebagai, “sebuah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi atau media *on line* internet.”

Berita dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: berita berat (*hard news*) dan berita ringan (*soft news*) (Haris Sumadiria. 2005: 66). Berita berat menunjuk pada peristiwa yang mengguncangkan dan menyita perhatian seperti kebakaran, gempa bumi, kerusakan dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Sedangkan berita ringan, sesuai dengan namanya, menunjuk pada peristiwa yang lebih bertumpu pada unsur ketertarikan manusia (*human interest*).

Sebuah berita memiliki kriteria umum nilai berita (*news value*). Kriteria umum nilai berita ini yang kemudian menjadi pedoman jurnalis untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita. Peneliti menggabungkan

konsep nilai berita menurut Haris Sumadiria (2005: 80-91) dan Eriyanto (2002: 106-107) menjabarkan kriteria umum nilai berita:

1. *Prominance*, berita diukur dari besarnya peristiwa dan aspek orang penting yang terlibat di dalamnya.
2. Keluarbiasaan (*unusualness*), yaitu sesuatu yang luar biasa. Dalam pandangan jurnalistik, berita bukanlah sesuatu peristiwa biasa. Berita adalah suatu peristiwa yang luar biasa.
3. Kebaruan (*newness*), yaitu berita adalah apa yang terbaru. Berita adalah apa saja yang disebut hasil karya terbaru, seperti sepeda motor baru, mobil baru, gedung baru, gubernur baru, presiden baru. Semua hal baru apapun namanya.
4. Akibat (*impact*), yaitu berita adalah segala sesuatu yang berdampak luas. Suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat.
5. Aktual (*timeliness*), yaitu berita adalah peristiwa yang sedang atau baru terjadi. Secara sederhana aktual berarti menunjuk pada peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Sesuai dengan definisi jurnalistik, media massa haruslah memuat atau menyiarkan berita-berita aktual yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
6. Kedekatan (*proximity*), yaitu berita adalah kedekatan. Kedekatan mengandung dua arti, kedekatan geografis dan kedekatan psikologis. Kedekatan geografis menunjuk pada

suatu peristiwa yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita. Kedekatan psikologis lebih banyak ditentukan oleh tingkat keterikatan pikiran, perasaan atau kewajiban seseorang dengan suatu objek peristiwa atau berita.

7. Informasi (*information*), yaitu berita adalah informasi. Tidak setiap informasi mengandung dan memiliki nilai berita. Setiap informasi yang tidak memiliki nilai berita tidak layak untuk dimuat, disiarkan atau ditayangkan media massa.

8. Konflik (*conflict*), yaitu berita adalah konflik atau segala sesuatu yang mengandung unsur atau sarat dengan dimensi pertentangan/konflik. Konflik atau pertentangan, merupakan sumber berita yang tak pernah kering dan tidak akan pernah habis. Selama orang menyukai dan menganggap penting olah raga, perbedaan pendapat dihalalkan, demokrasi dijadikan acuan, kebenaran masih diperdebatkan, peperangan masih terus berkecamuk di berbagai belahan bumi, dan perdamaian masih sebatas angan, selama itu pula konflik akan menghiasi halaman surat kabar, mengganggu pendengaran karena disiarkan di radio, menusuk mata karena selalu ditayangkan di televisi.

9. Orang penting (*public figure, news maker*), yaitu berita adalah tentang orang penting, orang-orang terkemuka, di mana pun selalu membuat berita. Jangankan ucapan dan tingkah lakunya,

namanya saja sudah membuat berita. Teori jurnalistik menegaskan, nama menciptakan berita. (*names make news*).

10. Kejutan (*surprising*), yaitu berita adalah kejutan. Kejutan adalah sesuatu yang datangnya tiba-tiba, diluar dugaan, tidak direncanakan, tidak diketahui sebelumnya.

11. Ketertarikan manusia (*human interest*), yaitu *news is interesting*. Kadang-kadang suatu peristiwa tidak menimbulkan efek berarti pada seseorang, sekelompok orang atau bahkan lebih jauh lagi pada suatu masyarakat, tetapi telah menimbulkan getaran pada suasana hati, suasana kejiwaan dan alam perasaannya. Hanya karena naluri, nurani dan suasana hati kita merasa terusik, maka peristiwa itu tetap mengandung nilai berita. Para praktisi jurnalistik mengelompokkan kisah-kisah *human-interest* ke dalam berita ringan, berita lunak (*soft news*).

12. Seks (*sex*), yaitu berita adalah seks. Seks adalah berita. Sepanjang sejarah peradaban manusia, segala hal yang berkaitan dengan perempuan pasti menarik dan menjadi sumber berita. Perempuan identik dengan seks. Dua sisi mata uang yang tak terpisah, selalu menyatu. Para praktisi jurnalistik berteori: media massa tanpa seks dengan segala dimensi dan manifestasinya, sama saja seperti bulan tanpa bintang, pohon tanpa daun, kolam tanpa ikan, sungai tanpa air. Sesuatu yang mustahil.

Isu dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden SBY merupakan berita yang layak untuk dimuat di surat kabar. Hal ini dikarenakan terdapat elemen orang penting di dalamnya yang memiliki kedudukan tinggi di lembaga negara.

Nilai-nilai berita tersebut bukan hanya menentukan peristiwa yang akan diberitakan, melainkan juga bagaimana peristiwa tersebut dikemas. Eriyanto (2007: 105) berpendapat bahwa nilai berita itu bukan hanya menjadi ukuran dan standar kerja, melainkan juga telah menjadi ideologi dari kerja wartawan.

Dalam pendekatan konstruktivis, berita bukan refleksi dari realitas. Berita hanyalah konstruksi dari realitas. Eriyanto (2002: 25) menggambarkan berita ibarat sebuah drama. “Berita bukan menggambarkan realitas, tetapi potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa.”

## **2.5 Konsep Kekuasaan**

### **2.5.1 Konsep Negara dan Kekuasaan Negara**

Berbicara mengenai kekuasaan yang dilakukan pemerintah, termasuk di sini adalah presiden, tentunya terlebih dahulu perlu untuk mengetahui sedikit gambaran mengenai konsep negara. Negara, menurut Max Weber (gerth & Mills, 1962: 78), adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara tentang negara, salah satu aspek yang besar dan paling menonjol adalah kekuasaan yang besar (Arief Budiman, 2002: 6).

Kekuasaan adalah secara mutlak milik negara. Sebab kekuasaan tersebut digunakan untuk mendidik warganya dengan nilai-nilai yang rasional.

Menurut dua pemikir besar Yunani kuno, Plato dan Aristoteles, kekuasaan yang besar pada negara merupakan hal yang sepatutnya. Sebab, individu akan menjadi liar, tak terkendali, apabila negara tidak memiliki kekuasaan yang besar. Seperti yang dikatakan Plato dalam (Schid, 1965: 26).

Dalam negara tersebut akan berkuasa akal (rasio) sebagai ganti Tuhan. Segala keinginan untuk mementingkan diri sendiri harus dihilangkan dahulu bilamana kehidupan negara yang sungguh-sungguh sempurna akan dicapai. Individu harus sama sekali tunduk pada keseluruhan (kolektivitet).

Sesuai dengan pemikiran yang telah disebutkan di atas, jelas bahwa, negara merupakan lembaga yang menguasai sebuah masyarakat. Tetapi, jelas pula bahwa negara terdiri dari berbagai lembaga di dalamnya. Lembaga-lembaga inilah yang kemudian saling berinteraksi dalam sebuah aturan dan prosedur yang membentuk sebuah sistem kekuasaan.

Kekuasaan negara seperti yang sudah disebutkan adalah mutlak. Negara adalah lembaga yang mengatur, menguasai masyarakat dalam negara itu, dan di dalam negara ada lembaga yang mengatur untuk membentuk sistem agar kekuasaan itu dapat diberlakukan pada masyarakat.

Arief Budiman dalam bukunya *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, mengutip pernyataan Greenberg (1990), menyebutkan bahwa ada empat aspek penting dalam negara yang perlu diperhatikan, yaitu: negara, rejim, pemerintah, dan kebijakan (Budiman, 2002: 82-90).

Negara, merupakan organisasi paling tinggi dan mencakup pengertian paling luas. Larson, seperti dikutip oleh Lawson (1991: 5) mengatakan bahwa negara adalah “sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumnya,” sementara pemerintah “sebagai agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam sebuah masyarakat politik.” Di sini dapat terlihat bahwa negara adalah struktur utama dan pemerintah adalah agen pelaksana dari negara.

Rejim, dalam pengertian ilmiah, seperti yang dirumuskan oleh Stephen D. Krasner, rejim lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang dianut oleh penguasa (pemerintah) dalam sebuah negara (Lawson, 1991: 4). Dalam pengertian selanjutnya, rejim bisa otoriter, demokratis atau variasi antara keduanya. Perubahan rejim berarti perubahan prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan (Budiman, 2002: 87). Indonesia saat ini adalah negara republik yang demokratis. Indonesia sendiri, sampai saat ini, terbentuk atas enam rejim pemerintahan yang berbeda-beda satu sama lain. Setiap rejim memiliki arah dan tujuan kekuasaan yang berbeda, terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Pemerintah atau aparat birokrasi, merupakan agen pelaksana dari negara. Yang dilaksanakan adalah kebijakan-kebijakan negara. Yang menjalankannya adalah lembaga eksekutif beserta orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dalam hal ini presiden adalah lembaga eksekutif yang paling utama yang memiliki mandat untuk melaksanakan kekuasaan negara. Teori

Max Weber tentang birokrasi menyatakan bahwa birokrat ini memang netral dan hanya mengikuti aturan yang sudah ada. Akan tetapi, dalam kenyataannya birokrasi memiliki kekuatan dan kemandiriannya sendiri, yang bisa mempengaruhi kebijakan sebuah organisasi, termasuk organisasi yang bernama negara. Pernyataan Weber ini ditegaskan oleh Greenberg (1990: 16) yang mengatakan: “konsep pejabat birokrasi sebagai pembuat kebijakan memiliki semacam kemandirian sendiri.”

Kalau demikian halnya, pemerintah atau aparat birokrasi di samping merupakan sebuah lembaga yang netral, juga merupakan lembaga yang bisa mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan subjektif para pemimpin. Jika demikian halnya, maka presiden sebagai individu yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahannya, juga bisa memiliki pendapat subjektif untuk menentukan kebijakkan yang akan dilakukannya, sehingga antara kepentingan negara dan individu menjadi bias.

Hal yang terakhir dari ke empat aspek negara yang disebutkan Greenberg adalah kebijakan. Kebijakan merupakan sesuatu yang nyata, tidak abstrak. Kebijakan merupakan produk terakhir dari sebuah proses negara. Dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh negara, kita bisa melihat jenis dari negara tersebut, bentuk dari rejimnya, dan sifat dari alat birokasinya.

Menurut Arief Budiman (2002: 122), “komponen negara yang paling penting adalah pemerintah.” Pemerintah, terutama pemimpin negara (presiden), memiliki kesadaran sendiri, mempunyai kepentingan dan perhitungan untuk mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga menjadi tidak

bisa dipisahkan antara negara dan pemimpin negara. Tentunya pemimpin negara memiliki keleluasaan dalam mengatur kebijakan yang akan diambilnya.

Perlu diingat bahwa dalam negara demokrasi, kebijakan adalah merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi dalam hal ini pemerintah (Budiman, 2002:89). Sehingga jelas, bahwa publik juga memiliki peran dalam menentukan kebijakan negara. Pemerintah (presiden) kemudian menjadi terbatas dalam hal penentuan kebijakan. Meski presiden memiliki kekuasaan, dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki kekuatan terbesar dalam sebuah negara.

Apa yang sudah dibentuk oleh negara tentunya segenap elemen harus menyesuaikan dan melakukannya, sebab, seperti yang dikatakan Plato, bahwa negara ada untuk mengatur masyarakatnya secara rasional. Sehingga apa bila kemudian pemerintah, dalam hal ini presiden, yang notabene memiliki kekuasaan ternyata menyalahgunakan kekuasaan tersebut maka akan melanggar keseimbangan negara.

Kekuasaan umumnya berbentuk hubungan (*relationship*), sebab pasti ada pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah; satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang mematuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat, sebab selalu ada yang lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan-kekuasaan (Budiardjo, 2007:36). Ketika perintah yang diminta pemimpin negara sesuai dengan apa yang menjadi

haluan negara, maka kekuasaan itu tetap pada jalur yang benar, yaitu untuk mengarah pada cita-cita, tujuan dari negara tersebut. Namun apabila kekuasaan yang dimilikinya digunakan untuk kepentingan pribadi yang menyalahi cita-cita dan tujuan negara, maka hal ini menyalahi aturan. Dan itu merupakan tindakan menyalahgunakan kekuasaan.

### **2.5.2 Kekuasaan, kewenangan dan wewenang**

Istilah kekuasaan dalam bahasa Inggris disebut *power*. Sedangkan kewenangan disebut *authority* dan istilah wewenang disebut *competence*. Secara sosiologis kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Kekuasaan pada dasarnya memiliki sifat yang netral dan baik atau buruknya tergantung pada cara dan tujuan penggunaannya (Marbun, 2003: 122).

Miriam Budiardjo (2007: 35) mendefinisikan kekuasaan sebagai berikut:

kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk memengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Gejala kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk hidup bersama.

Selanjutnya, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang, secara yuridis adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang

diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian kewenangan adalah kumpulan dari wewenang-wewenang (Marbun, 2003: 123).

Sebagai contoh, dalam buku karangan Franz Magnis-Suseno yang berjudul *Berebut Jiwa Bangsa* (2007: 175-176) dikatakan, “rejim Orde Baru memakai Pancasila untuk melegitimasi pegangan eksklusif dan tak terbantahkan pada kekuasaan. Itulah fungsi Pancasila di bawah rejim Orde Baru.” Digambarkan lebih lanjut dalam buku ini bahwa Pancasila digunakan sebagai alat untuk melancarkan segala bentuk kebijakan dalam rejim Soeharto. Salah satunya adalah penggunaan Pancasila untuk melawan segala bentuk usaha melawan kesewenangan Orde Baru yang mengacu pada demokrasi dan hak-hak asasi manusia (Magnis-Suseno, 2007: 176).

Analisis Franz Magnis-Suseno tentang kekuasaan dalam rejim Orde Baru adalah contoh penyalahgunaan kekuasaan yang menggunakan Pancasila sebagai alat pelanggeng kekuasaan pada rejim Orde Baru.

Kemudian, pada era sekarang ini, pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu mengenai penyalahgunaan kekuasaan kembali terdengar. Menurut kawat rahasia kedutaan Amerika Serikat yang bocor ke Wikileaks dan kemudian diberitakan oleh *The Age* dan *The Sydney Morning Herald*, dikatakan bahwa Presiden Yudhoyono menggunakan kekuasaannya itu untuk mengintervensi hakim guna melindungi tokoh politik yang korup dan menggunakan hakim untuk menekan musuh-musuhnya. Menggunakan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memata-matai lawan politik Yudhoyono.

Dalam dokumen tersebut juga dikatakan adanya keterlibatan wakil presiden SBY dalam periode pertama, Jusuf Kalla, dalam mendanai partai politik besar, serta disebutkan bahwa ibu negara mencari peluang untuk memperkaya diri melalui koneksi-koneksi politik.

Dalam perkara ini peneliti mencoba memahami duduk permasalahan. Pada tahun 2004, saat Susilo Bambang Yudhoyono resmi menjabat sebagai presiden menggantikan Megawati Soekarnoputri, Kejaksaan Agung saat itu tengah menyelidiki kasus korupsi. Salah satu kasus korupsi yang sedang diselidiki adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Taufiq Kiemas, yang diduga menikmati keuntungan sejumlah proyek bernilai miliaran dolar, termasuk pengadaan *Jakarta Outer Ring Road* bernilai US\$2,3 miliar. Pada tahun 2004, Taufiq Kiemas adalah anggota DPR dari fraksi PDI-P.

Untuk melakukan penyidikan, Jaksa Agung harus meminta persetujuan dari presiden agar dapat dilaksanakan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Bab IX, Bagian Ketiga mengenai Penyidikan. Disebutkan dalam pasal 106, poin pertama, bahwa :

Dalam hal Anggota MPR, DPR dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden.

Jaksa Agung memang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa presiden memiliki wewenang untuk memberi izin secara tertulis apakah sebuah proses penyidikan dapat dilakukan atau tidak dilakukan.

Menurut informasi kawat rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat yang telah dihimpun, presiden menginstruksikan/memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji agar penyidikan terhadap Taufiq Kiemas tidak dilanjutkan. Meskipun sebelumnya Jaksa Agung telah memiliki bukti-bukti yang cukup. Dari sinilah kemudian muncul penilaian bahwa Presiden Yudhoyono diduga melindungi tokoh korup.



## 2.6 Kerangka Pemikiran

Di bawah ini adalah kerangka pemikiran peneliti dengan menggunakan pemberitaan penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden SBY dalam harian surat kabar *Media Indonesia* dan *Kompas* :

Gambar 2.3  
Kerangka Pemikiran

